

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah mendapatkan peluang dari pemerintahan pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya lewat kewenangan yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD, dan penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan suatu daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah . Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Pendapatan daerah berperan penting sebagai salah satu indikator untuk melihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahannya.

Menurut pernyataan Bupati Langkat, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Langkat untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.361.512.739.444,63 dimana angka ini merupakan 100,41% dari target yang dianggarkan dan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan berjumlah Rp 156.520.657.861,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 167.523.076.879,63 (Inang, 2020). Untuk tahun 2020 realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Langkat mencapai 97,34%, dimana jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Langkat menargetkan Rp 2.180.786.190.792,00 dan dapat merealisasikan sebesar Rp 2.122.684.872.331,88 (Agus, 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2019, anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 167.120.835.030,00 sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat yang terealisasi adalah sebesar Rp168.843.723.199,88

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dilaporkan bersumber dari 11 jenis pajak, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan PBB pedesaan dan perkotaan (Imam, 2021). Menurut Rahmanuddin Rangkuti selaku Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Langkat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat yang terdiri dari berbagai sumber tersebut terdampak pandemi COVID-19, dikarenakan adanya

penutupan beberapa objek wisata dan tempat hiburan dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 (Laila, 2021).

Tahun 2020 adalah tahun awal mula adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut data BPS, akibat pandemi ini banyak kabupaten yang ada di Sumatera Utara tidak dapat merealisasikan target Pendapatan Asli Daerahnya dan mengalami penurunan persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya. Beberapa kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Simalungun yang hanya dapat merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 90,51% dan mengalami penurunan PAD sebesar 0.17% dari tahun sebelumnya, Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat mencapai target realisasi PAD sebesar 88,39%, Kabupaten Deli Serdang yang hanya dapat merealisasikan PAD sebesar 73,58% dari target dan mengalami penurunan PAD sebesar 0,02%. Berdasarkan situasi diatas, untuk mengetahui kondisi dan akuntansi pendapatan pada PAD kabupaten Langkat yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara dimasa pandemi Covid-19, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Atas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Pada Masa Pandemi”**

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain :

1. Apa saja klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat?

2. Bagaimana penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat?

13 Tujuan Penulisan

Adapun hal yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, antara lain :

- 1) Untuk mengetahui klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.
- 2) Untuk mengetahui penerapan akuntansi pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.
- 3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat

14 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup karya tulis yang ditulis oleh penulis membahas tentang Tinjauan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat. Pembahasan akan terfokus pada dampak COVID-19 terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat. Karena keterbatasan pengambilan data, penulis hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020.

15 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari karya tulis ini, antara lain:

1. Manfaat akademis

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai praktik akuntansi pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.

2. Manfaat praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif diantaranya :

a. Bagi penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat penulis dari mata kuliah akuntansi pemerintah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Langkat

Sebagai masukan dan evaluasi untuk penerapan akuntansi pendapatan pada pemerintah Kabupaten Langkat.

16 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan secara umum pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang akan penulis bahas, ruang lingkup, tujuan penulisan karya tulis, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang disajikan pada karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat penulis seperti definisi dari Pendapatan Asli Daerah, klasifikasi, penyajian dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah, serta pengakuan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, penjelasan terkait data yang telah diperoleh dalam rangka pembuatan karya tulis, gambaran umum mengenai objek penulisan, serta pembahasan terkait rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan merangkum dan menyimpulkan pembahasan dari rumusan masalah yang diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang membaca.